PENYEMPURNAAN PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 - 2026

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERSIPAN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Raya Jakarta – Serang KM.4 Kabupaten Serang – Banten
Telp. (0254) 280774 Fax. (0254) 280785

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BANTEN

NOMOR: 800/Kep. - DPK/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
TIM PERUBAHAN PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2023 - 2026
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BANTEN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BANTEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Perubahan Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 - 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Perubahan Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 - 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemharan Negara Renublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemharan Negara Renublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemharan Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lemharan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lemharan DaerahProvinsi Banten Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perubahan Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 , dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal Februari 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BANTEN

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Tk. I
NIP. 19700320 200112 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten
Nomor : 800/Kep. 08 - DPK/2023
Tanggal : 01 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERUBAHAN PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2023 - 2026
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BANTEN

A. Susunan Keanggotaan

Penanggungjawab	:	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.
Ketua	:	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.
Sekretaris	:	Fungsional Perencana Ahli Muda.
Anggota	:	1. Kepala Bidang Perpustakaan 2. Kepala Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 3. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Provinsi Banten 5. Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda 6. Fungsional Arsiparis Ahli Muda 7. Fungsional Pustakawan 8. Fungsional Arsiparis 9. Fungsional Penerjemah

B. Uraian Tugas:

1. Melakukan rapat pembahasan dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 - 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.
2. Menyiapkan data dan bahan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.
3. Menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BANTEN

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Tk. I
NIP. 19700320 200112 1 001

`

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud Dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 7

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 7

2.1.1 Tugas 7

2.1.2 Fungsi 7

2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah 8

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 9

2.2.1 Sumber Daya Manusia 9

2.2.2 Sarana dan Prasarana 10

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 16

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 19

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan 19

3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD 20

3.2.1 RPJPD Provinsi Banten 20

3.2.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi 21

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga 22

3.4 Telaahan Renstra Perpustakaan dan Kearsipan Kab/Kota se-Provinsi Banten 26

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 29

3.6 Penentuan Isu Strategis 29

`

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 31
4.1 Tujuan Jangka Menengah DPK Provinsi Banten 31
4.2 Sasaran Jangka Menengah DPK Provinsi Banten 32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN 41
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 52
BAB VIII PENUTUP 54
LAMPIRAN 56

`

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Tahun 2021 9

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural Dan Jabatan Fungsional 10

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan jenis Kelamin 10

Tabel 2.4 Rekapitulasi Prasarana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 11

Tabel 2.5 Sarana Transportasi DPK Provinsi Banten 11

Tabel 2.6 Koleksi Pustaka Tercetak Dan Terekam 13

Tabel 2.7 Akuisisi Arsip Banten 13

Tabel 2.8 Koleksi Digitalisasi Arsip 14

Tabel 2.9 Target Indikator Kinerja Utama Eselon II 14

Tabel 2.10 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III 15

Tabel 3.1 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah 19

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi dan Misi 21

Tabel 3.3 Telaahan Renstra Perpusnas RI 2020 – 2024 dan Renstra ANRI 2020 – 2024 22

Tabel 3.4 Telaah an Renstra Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten / Kota Se- Provinsi Banten..... 26

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 29

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPK Provinsi Banten 32

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 35

Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tahun 2023 – 2026 41

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 44

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Bidang Urusan Esellon II..... 52

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program pada DPK Provinsi Banten 53

`

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 8

`

LAMPIRAN

Lampiran I Pohon Masalah PD

Lampiran II Pohon Kinerja PD

Lampiran III Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran dan Program, Meta Indikator Devinisi Operasional

`

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui, bahwa tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Banten akan berakhir pada tahun 2025. Periode RPJMD Tahun 2017 - 2022 Provinsi Banten juga akan berkahir pada tahun 2022. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 menyatakan bahwa Gubernur menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023 – 2026 serta memerintahkan seluruh kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023 – 2026. Dimana selanjutnya penyusunan RKPD Provinsi berpedoman pada RPJPD Provinsi 2005-2025, memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RKP tahun 2023 serta tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 - 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten sebagai dokumen perencanaan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi 2005 – 2025 dengan memperhatikan RPJMN 2020 – 2024 dan RKP tahun 2023 serta tahun 2024.

Sebagaimana diketahui terdapat 4 (empat) agenda utama pembangunan daerah Provinsi Banten sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi tahun 2005 – 2025 yang meliputi: (1) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas (2) Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan (3) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; (4) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Ruang lingkup penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, dilakukan bersamaan setelah Provinsi Banten menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten 2023 – 2026, dengan mengacu pada RPD Provinsi Banten 2023 – 2026 serta perundangan yang

`

berlaku. Ruang lingkup dari pedoman penyusunan Renstra 2023 – 2026 ini meliputi penjelasan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Strategis OPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan visi, misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Selain itu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026
2. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra merupakan bagian dari suatu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Dalam penyusunan Rencana Strategis, dijabarkan rencana kerja tahunan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD. Dokumen Renstra juga berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2023– 2026 adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan tentang Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

`

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dareah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruktur Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
15. Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024;
16. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI Tahun 2020 – 2024;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030;
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

`

22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
23. Peraturan Gubernur Banten No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
24. Peraturan Gubernur Banten No. 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026;
25. Peraturan Gubernur Banten No. 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten dimaksudkan sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, karena Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, penyusunan dan penerapan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten untuk tahun 2023-2026 ini dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang perpustakaan dan kearsipan selama kurun waktu tahun 2023 – 2026 ke depan;
2. Memberikan kerangka landasan sekaligus tolok ukur bagi pencapaian tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2023 – 2026`;
3. Sebagai alat pengendali dalam pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat di bidang perpustakaan dan kearsipan;
4. Sebagai media informasi kepada para pemangku kepentingan terkait rencana program dan kegiatan tahunan yang dilaksanakan Dinas

`

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perpustakaan dan kearsipan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2023–2026 secara garis besar disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

   Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, ruang lingkup, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.
2. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Banten;

   Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh DPK Provinsi Banten, kinerja pelayanan DPK Provinsi Banten dari tahun 2018 – 2021;
3. BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah Provinsi Banten

   Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah DPK Provinsi Banten, telaahan visi, misi RPJPD, telaahan Renstra DPK Provinsi Banten berdasarkan sasaran renstra K/L beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
4. BAB IV Tujuan dan Sasaran

   Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten;
5. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

   Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan, tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Tantangan, Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten serta identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi DPK Provinsi Banten;
6. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

   Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten dari tahun 2023 - 2026 yang dilengkapi dengan indikator kinerja, dan pendanaan indikatif;

`

7. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perpustakaan Dan Kearsipan

   Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Banten;

8. BAB VIII Penutup

   Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan kurun waktu 2023 - 2026 kedepan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten pasal 101, mengemukakan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah rnempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengelolaan perpustakaan tingkat provinsi;
2. Pembudayaan gemar membaca tingkat provinsi;
3. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah di provinsi;
4. Penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah;

`

5. Pelestarian naskah kuno milik provinsi;
6. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
7. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah daerah provinsi dan BUMD provinsi;
8. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah provinsi, BUMD provinsi, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi, organisasi politik tingkat Daerah provinsi, tokoh masyarakat tingkat Daerah provinsi;
9. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat provinsi;
10. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
11. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi;
12. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah kabupaten/kota;
13. Penyelenggaraan autentikasi arsip statis dan arsip dinamis hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi;
14. Melaksanakan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip;
15. Penerbitan rekomendasi izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Banten mengalami perubahan SOTK baru dan DPK Provinsi Banten termasuk didalamnya juga yang berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah, dengan uraian susunan organisasi sebagai berikut:

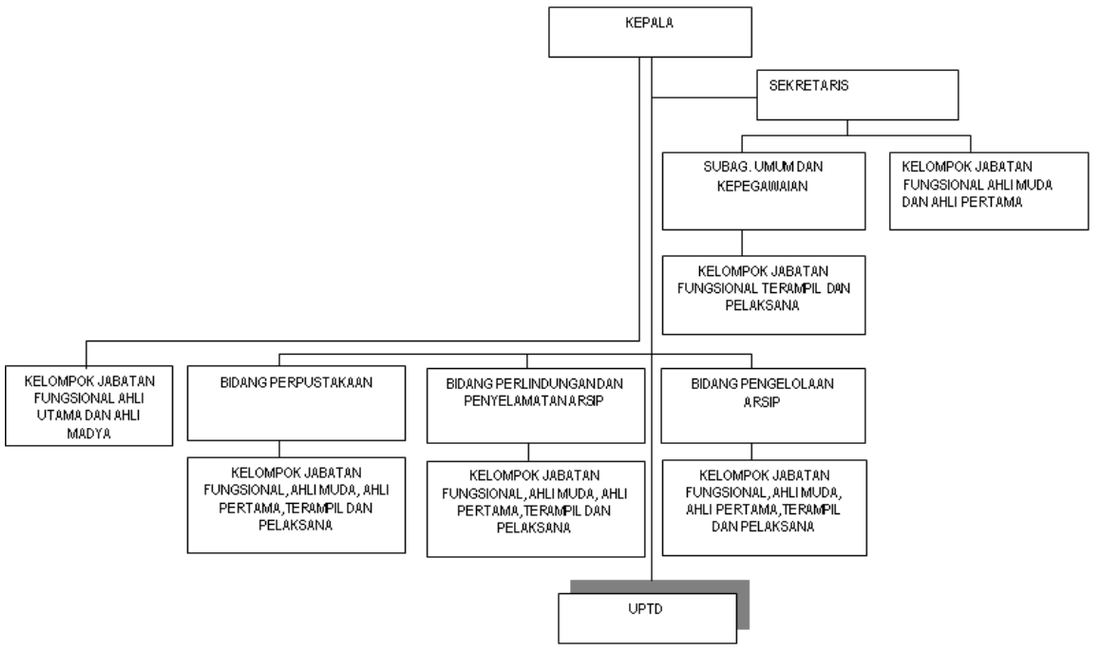

Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2022, struktur DPK Provinsi Banten terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, serta tiga bidang, yaitu : 1) Bidang Perpustakaan, 2) Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, 3) Bidang Bidang Pengelolaan Arsip, serta jabatan fungsional dan pelaksana. Struktur organisasi DPK Provinsi Banten terdiri dari :

A. Kepala Dinas;
B. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
C. Kepala Bidang Perpustakaan;
D. Kepala Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
E. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip;
F. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
G. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten didukung oleh sejumlah personil

`

yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten didukung aparatur yang terbagi menurut bidang dan sekretariat. Pada tahun 2022 jumlah pegawai yang berada di lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten adalah sebanyak 111 orang.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan 2022

No	Pendidikan	PNS (orang)	CPNS (orang)	TKK/TKS (orang)	Jumlah Pegawai (orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6(3+4+5)	(7)
1.	S3	1	-	-	1	1%
2.	S2	13	-	-	13	11,2%
3.	S1	28	-	19	47	42,2%
4.	D3	4	-	-	4	3,4%
5.	SMA	19	-	28	47	43,1%
Jumlah		**64**	**0**	**47**	**111**	100,0%

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural Dan Jabatan Fungsional

No	Jabatan Struktural	Jumlah	Jabatan Fungsional	Jumlah
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	Esselon II	1	Pustakawan	13
2.	Esselon III	4	Arsiparis	7
3.	Esselon IV	11	Penerjemah	2
4.	-	-	Fungsional Umum/Pelaksana	25
Jumlah		16		47

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Laki-Laki	65
2.	Perempuan	46
Jumlah		**111**

`

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai. Dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPK Provinsi Banten maka dibutuhkan perbaikan ataupun penambahan untuk beberapa jenis sarana dan prasarana kerja, seperti bangunan kantor, gedung depo arsip, kantin, Mushola dan sarana parkir kendaraan, perangkat komputer, perangkat teknologi informasi (IT), meubeler, Koleksi buku perpustakaan, khazanah arsip serta kendaraan operasional dinas. Secara Iebih jelas kondisi sarana dan prasarana di DPK Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Prasarana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	URAIAN	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	LOKASI ALAMAT	STATUS
1	Tanah Bangunan	7.500 m2		Jl. Serang Jakarta Block Sapiah Kel. Penancangan Cipocok Jaya Kota Serang	Sertifikat Hak Milik Pemda
2	Bangunan Gedung Permanen/Perkantoran	7.500 m2	4.500 m2	Jl. Raya Serang Jakarta KM. 4 Pakupatan Kota Serang	Hak Milik Pemda Tiga Lantai, Perpustakaan, Kearsipan, serta Sekertariat
3	Garasi Mobil/Awning	40 m2	40 m2	Jl. Raya Serang Jakarta KM. 4 Pakupatan Kota Serang	Hak Milik Pemda

Sumber: Aset Barang Milik Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Tabel 2.5
Sarana Transportasi DPK Provinsi Banten

No	NAMA/JENIS BARANG	Jumlah	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
	Kendaraan Roda Dua			
1	Honda R2/125 cc (2007)	1	v	
2	Honda NF 100/100 cc (2003)	1	v	
3	Honda R2/125 cc (2011)	1	v	
4	Honda R2/ 160 cc (2005)	1	v	

`

No	NAMA/JENIS BARANG	Jumlah	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
5	Honda NC11B3C A/T (2011)	1	v	
6	Honda R2/125 cc (2015)	2	v	
7	Honda Beat/ 110 cc (2015)	3	v	
	Kendaraan Roda 4		v	
1	Honda CRV Jeep (2015)	1	v	
2	Ford Ranger (2014)	1	v	
3	Toyota Innova (2009)	1	v	
4	Toyota Avanza (2011)	1	v	
5	Toyota Avanza (2010)	1	v	
6	Toyota Avanza (2012)	1	v	
7	Nissan Evalia (2014)	1	v	
8	Toyota Hiace (2014)	1	v	
9	Isuzu Elf (2009)	1	v	
10	KIA Travelo(2013)	1	v	
11	Toyota Hilux (2012)	1	v	
12	Toyota Hilux (2010)	1	v	
13	Isuzu Elf (2015)	2	v	
14	Honda Mobilo (2016)	2	v	
15	APV ARENA (2016)	1	v	
16	APV BLINTVAN (2016)	1	v	
17	Toyota Hilux (2017)	2	v	
	Kendaraan Roda 3			
1	Motor VIAR	2	v	
	Alat Bengkel dan Alat Kantor			
1	Mesin Bor	1	v	
	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
1	Mesin ketik elektronik	6	v	
2	Mesin fotocopy dengan kertas polio	1		v
3	Mesin fotocopy dengan kertas biasa double polio	5	v	
4	Lemari besi	30	v	
5	Rak besi/metal	147	v	
6	Rak kayu	30	v	
7	Filing besi metal	76	v	
8	Lemari kaca	10	v	
9	Alat penghancur kertas	10	v	
10	Papan nama instansi	5	v	
11	Papan pengumuman	1	v	
12	Alat penghancur kertas globe	6	v	
13	Mesin absensi	1	v	
14	Alat pemotong kertas	1	v	
15	Overhead proyektor	6	v	
17	Alat kantor lainnya	20	v	
18	Lemari kayu	5	v	
19	Meja kayu/ rotan	13	v	
20	Meja rapat	2	v	
21	Meja tulis	35	v	
22	Meja receptionist	1	v	
23	Meja tambahan	1	v	
24	Meja-meja panjang	5	v	
25	Kursi tamu	2	v	
26	Kasur	1	v	
27	Sofa	5	v	
28	Lemari pakaian	1	v	
29	Mesin penghisap debu	1	v	
30	Lemari es	4	v	
31	Ac unit	22	v	
32	Ac split	14	v	
33	Alat pendingin lain-lain	1	v	

No	NAMA/JENIS BARANG	Jumlah	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
34	Televise	7	v	
35	Cassete recorder	1	v	
36	Sound system	1	v	
37	Compact disc	1	v	
38	Wireless	3	v	
39	Camera film	3	v	
40	Tustel	1	v	
41	Tangga alumunium	1	v	
42	Handycam	1	v	
43	Alat rumah tangga lainnya	23	v	
44	PC Unit	27	v	
45	Laptop	12	v	
46	Note book	2	v	
47	Personal komputer lainnya	3	v	
48	Hard disk	25	v	
49	Peralatan computer mainframe lainnya	3	v	
50	Printer	21	v	
51	CPU	4	v	
52	Monitor	7	v	
53	Scanner	8	v	
54	Peralatan personal computer lainnya	25	v	
55	Server	6	v	
56	Hub	2	v	
57	Peralatan jaringan lainnya	13	v	
58	Meja kerja pejabat esselon II	1	v	
59	Meja kerja pejabat lain-lain	3	v	
60	Meja tamu ruangan tunggu pejabat esselon III	2	v	
61	Kursi kerja pejabat esselon II	1	v	
62	Kursi tamu di ruangan pejabat esselon II	1	v	
63	Lemari arsip untuk arsip dinamis	123	v	
	Alat studio dan alat komunikasi			
1	Microphone/wireless	1	v	
2	Unintemuptible Power Suply (UPS)	3	v	
3	Digital Audio Tape Recorder	1	v	
4	Peralatan Studio Visual Lain-lain	40	v	
5	Camera Electronic	6	v	
6	Tripod Camera	1	v	
7	Alat penyimpan data	3	v	
8	Telephone (PABX)	1		v
9	Switchwe antena lain-lain	1	v	

Sumber: Aset Barang Milik Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Tabel 2.6
Koleksi Pustaka Tercetak Dan Terekam

No	Uraian	Jumlah
1	Koleksi Sirkulasi Dan Referensi	28.468 Judul / 91.403 Eksemplar
2	Koleksi Buku MUPK	8.885 Judul / 26.665 Eksemplar
3	Koleksi Banten Corner	985 Judul / 2.955 Eksemplar
4	Koleksi Sumbangan / Hibah	12.900 Judul / 15.651 Eksemplar
5	Koleksi Deposit / KCKR	3.679 Judul / 4.478 Eksemplar
6	Koleksi Terbitan Berkala	140 Judul / 1.062 Eksemplar
7	Koleksi Silang Layang	2.401 Judul / 21.213 Eksemplar
8	Koleksi E-Book	3.564 Judul / 15.068 Copy
9	Koleksi Braille	108 Judul / 279 Eksemplar
10	Koleksi Terekam / Film	159 Judul / 299 Copy
	Jumlah	61.289 Judul / 179.073 Eksemplar

`

Tabel 2.7
Akuisisi Arsip Banten

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Jumlah Arsip Kertas	6.026 Box
2	Jumlah Arsip Foto	5.897 lembar
3	Jumlah Arsip CD/VCD/DVD	18 Keping
4	Jumlah Kaset Audio	15 Kaset
5	Jumlah Peta	186 Lembar
6	Jumlah Arsip Kuno	6 Dokumen

Tabel 2.8
Koleksi Digitalisasi Arsip

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Arsip Foto	2.369 lembar
2	Arsip Peta	107 lembar
3	Arsip Kertas	24.000 lembar
4	Arsip Buku	42 buah
5	Compact Disk	28 keping
	Jumlah	26.546 Lembar

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam visi dan misi DPK Provinsi Banten. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dibawah ini disampaikan kinerja pelayanan DPK Provinsi Banten :

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.9
Target Indikator Kinerja Utama Eselon II
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten
(Renstra DPK 2017-2022)

No	Tujuan	Sasaran	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2018	2019	2020	2021	**2022**
1	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur yang berintegritas, berkompetensi serta Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal							
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	B	BB	BB	A	**A**
		Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan	80	85	90	95	**100**
2	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan Menuju Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing							
		Meningkatnya Budaya Literasi	Indek Minat Baca Masyarakat	0	0	40	45	**50**
			Persentase peningkatan minat baca masyarakat	30	35	0	0	**0**

Tabel 2.10
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III
(Revisi Renstra DPK Tahun 2018 s.d 2021)

Program	Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome)	Target			
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Program Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)	2,80	3,00	0	0
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0	0	100	100
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0	0	100	100
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0	0	100	100
	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0	0	100	100
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Cakupan pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus	85,00	90	95	0

`

Program	Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome)	Target			
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	(Satuan: %)				
Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Pembinaan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus Dan Perpustakaan Sekolah	0	0	0	100
	Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (Satuan: %)	0	0	0	85
Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (Satuan: %)	75,00	80	85	0
Program Pengelolaan Arsip	Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %)	80,00	85	90	95
	Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %)	80,00	85	90	95
	Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %)	85,00	90	95	0
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %)	0	0	0	100

Catatan : Kolom warna kuning adalah Program Eksisting sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Secara umum disampaikan bahwa kinerja pelayanan urusan Perpustakaan dan Kearsipan telah dituangkan dalam target kinerja indikator sasaran dan indikator program diatas untuk memudahkan pengukuran maupun evaluasi dalam pelaksanaan yang dilakukan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bidang lingkup perpustakaan dan kearsipan memiliki tantangan untuk menghadapi dan mencari solusi berdasarkan kebijakan yang berpihak pada penyelamatan budaya dan aset bangsa sebagai suatu ilmu dan alat rekam pengetahuan di masa mendatang sebagaimana diungkapkan secara tersirat dalam Rencana Strategi Perpustakaan RI Tahun 2020-2024 tentang arah kebijakan dan strategi nasional berupa peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, penguatan konten literasi dan transformasi perpustakaan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter, Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan bahan perpustakaan dan naskah nusantara bagi terwujudnya pemajuan kebudayaan

`

untuk memperteguh jati diri bangsa dan Peningkatan tata kelola dan manajemen Perpustakaan Nasional RI yang baik dan andal. Arah kebijakan dan strategi nasional inilah yang ke depannya harus segera diprediksi dari awal yang menjadi tantangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten untuk membangun perpustakaan dan arsip daerah yang lebih terarah dan terukur dengan cara tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pemustaka dan stakeholders yang terkait. Satu hal yang perlu diperhatikan adanya misi pertama dari pemerintah daerah provinsi Banten tahun 2023-2026 untuk Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas dengan tujuan Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang menjadi tantangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten untuk memberikan layanan kepada seluruh masyarakat provinsi banten sebagai pemustaka potensial (*potential user*) yang menjadi sasaran pelayanan perpustakaan. Agar layanan perpustakaan dapat menjangkau seluruh masyarakat provinsi banten dan membuat semuanya menjadi pemustaka *riil (actual user)* diperlukan usaha yang terencana, sistematis dan berkesinambungan.

Pada tataran global, adanya agenda yang dicanangkan oleh Federasi Internasional dan Asosiasi Perpustakaan (IFLA) menetapkan bahwa bagaimana perpustakaan berkontribusi dalam program pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan akses terhadap pengetahuan dan pemerolehan informasi, mendukung keterampilan literasi dalam pembangunan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan informasi yang menjadi unsur yang penting dalam keberlanjutan pembangunan. Hal ini menjadi **peluang** bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten dengan jumlah koleksi yang memadai untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya dan akurat sesuai dengan kebutuhan.

Sasaran Renstra ANRI tahun 2020 – 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut; 1) Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan, 2) Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional, 3) Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima, 4) Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI. Bila dilakukan tinjauan terhadap sasaran tersebut bidang lingkup kearsipan memiliki **tantangan** untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang profesional

melalui pengembangan manajemen arsip/dokumen negara yang modern sebagaimana diungkapkan dalam program Renstra Arsip Nasional RI Tahun 2020-2024.

Mencermati kinerja Kearsipan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPK Provinsi Banten tahun 2022 sub bagian pengukuran capaian kinerja indikator utama dari tahun 2018 s.d 2022 dan didasarkan dari hasil analisis permasalahan pelayanan OPD dari analisis RTRW serta KLHS menyatakan bahwa cakupan koneksi Sistem Informasi Kearsipan Provinsi (SIKP) masih belum optimal sehingga dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten diupayakan harus mampu membenahi pelayanan kearsipan, menjaga dan memelihara kehidupan arsip sehingga dapat memberikan kesahihan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika ditinjau dari Renstra Perangkat Daerah kota dan Kabupaten di propinsi Banten dalam tahun 2017 sampai dengan 2022 diperoleh informasi bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan publik pada Kantor Arsip dan Pepustakaan di kabupaten dan kota sangat diperlukan dukungan kelompok jabatan fungsional arsiparis. Sebagaimana data dikemukakan kondisi jabatan fungsional arsiparis yang semula dalam jumlah relatif cukup dan tersebar sampai pada kecamatan, seiring perjalanan waktu berkurang dikarenakan terjadinya pensiun, struktural dan mutase, sehingga saat ini fungsional arsiparis sangat langka. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi tantangan bagi DPK Provinsi Banten untuk menambah jabatan fungsional arsiparis sesuai dengan standar dan kebutuhan masing-masing dan disebarkan ke tiap-tiap Dinas Perpustakaan dan Kearsip Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Selain dari itu, perlu diketahui berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah: (a) menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan; (b) menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; (c) menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; (e) mendinamiskan

`

penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu; (f) menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (g) menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan (h) meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Sehingga hal tersebut menjadi tantangan dan peluang bagi kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten untuk ikut berkontribusi dalam mewujudkan terealisasinya tujuan tersebut.

Program Profesional dan Petunjuk Strategis menetapkan enam tujuan strategis untuk sepuluh tahun ke depan disepakati tahun 2017 yang dicanangkan oleh International Council Archives (ICA) meliputi; 1) Meningkatkan Kesadaran akan Pentingnya Arsip, 2) Menanggapi Tantangan Teknologi Baru, 3) Mengembangkan Kapasitas dalam Profesi Arsip, 4) Untuk memperkuat jaringan ICA, 5)

`

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan (Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah)

Perpustakaan dan kearsipan memiliki kemiripan dalam pengurusan kegiatan dan layanan informasi, hal ini dapat ditelusur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Secara detail masing-masing pekerjaan itu tidak sama pengaturannya. Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam tugas dan fungsi pelayanan DPK terdapat beberapa aspek telaah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

Urusan	Bidang Urusan	Permasalahan		
		Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Belum Optimalnya Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Belum Optimalnya Pembinaan Perpustakaan	Belum Optimalnya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
				Belum Optimalnya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Belum Optimalnya Peningkatan ketersediaan, keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Belum Optimalnya Pengelolaan Arsip	Belum Optimalnya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
				Belum Optimalnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi

`

Urusan	Bidang Urusan	Permasalahan		
		Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Belum Optimalnya Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
			Belum Optimalnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Belum Optimalnya Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi
				Belum Optimalnya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memiliki Retensi dibawah 10 Tahun

3.2. Telaahan Visi, Misi RPJPD

3.2.1. RPJPD Provinsi Banten

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah jangka panjang yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang mempunyai karakteristik tersendiri.

Visi RPJPD Provinsi Banten tahun 2005-2025 adalah Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa. Misi RPJPD Provinsi Banten, meliputi:

1 **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas**

2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan

3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa**

3.2.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mendukung visi dan misi beserta tujuan sasaran yang telah dirumuskan, terdapat faktor pendukung dan penghambat pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipa Provinsi Banten yaitu :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi dan Misi

No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	**Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas**		Kurangnya komitmen bersama para pemangku kepentingan terhadap peran penting perpustakaan dalam peningkatan IPM	Penguatan regulasi urusan Perpustakaan dan dukungan penganggaran
	Program Pembinaan Perpustakaan	Penyediaan bahan Bacaan, promosi perpustakaan dan minat baca, kemudahan akses pelayanan perpustakaan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat	- Kondisi geografis - Perhatian pemangku kebijakan Terhadap keberadaan perpustakaan masih belum maksimal - Banyak desa terpencil yang belum terlayani perpustakaan	Kerjasama, koordinasi, sinkronisasi yang baik dengan Pemerintah Kab./ Kota dalam memberikan layanan perpustakaan dan peningkatan literasi
		Masih kurangnya tenaga perpustakaan dan pustakawan	- Kebijakan impasing kurang diminat - Keterbatasan anggaran untuk mendanai tenaga perpustakaan - Formasi penerimaan CPNS tenaga fungsional khususnya pada perpustakaan sekolah terbatas	- Masih terbukanya jalur fungsional pustakawan - Tersedianya Diklat/Bimtek Perpustakaan
		Belum maksimalnya pengelolaan data perpustakaan	- Kurangnya koordinasi antar lembaga - Belum maksimalnya penganggaran untuk pendataan - Kompilasi data perpustakaan belum digarap serius	Peraturan Gubernur Banten No 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Provinsi Banten
		Tingkat kunjungan dan keterlibatan masyarakat terhadap perpustakaan perlu ditingkatkan	- Pandemi Covid-19 belum usai - Belum optimalnya layanan i-Banten dan kurangnya variasi judul e-book	Inovasi layanan perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi informasi
2	**Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang**		Pengelolaan arsip di setiap lembaga pencipta arsip belum maksimal	Nilai Pengawasan Kearsipan dijadikan indikator Reformasi

No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Baik, Bersih, dan Berwibawa			Birokrasi dan indikator pada secretariat
	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan arsip di lembaga pencipta arsip belum maksimal	- Khasanah arsip statis masih terbatas - Arsip konvensional belum seluruhnya di alih media - Belum ada implementasi e-arsip - Pembinaan dan tindak lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan belum maksimal - Belum adanya aplikasi pengelolaan arsip statis - Belum semua OPD memiliki record center yang representatif	- Penguatan regulasi kearsipan - Adanya Pengelola Arsip dan fungsional arsiparis pada sebagian besar OPD
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Sarana dan Prasarana preservasi, penyelamatan dan pelestarian arsip serta dukungan SDM belum maksimal	- SDM yang menguasai preservasi arsip belum ada - Keterbatasan ruangan dan anggaran	Dukungan ketersediaan program, kegiatan hingga sub kegiatan pada SIPD
		Masih sedikitnya OPD yang melakukan pemusnahan arsip	- Komitmen Kepala OPD - Kurangnya pemahaman tentang pemusnahan arsip	- Tersedianya Pergub JRA - Tersedianya Juknis Pemusnahan Arsip

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Tabel 3.3
Telaahan Renstra Perpusnas RI 2020 – 2024 dan Renstra ANRI 2020 – 2024

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Program	Indikator
1	**Perpustakaan Nasional Republik Indonesia**		
1	Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi	Perpustakaan dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi	- Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk, dengan target 1:16 tahun 2020 menjadi 1:12 tahun 2024 - Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk, dengan target 1:20.000 tahun 2020 menjadi 1:16.000 tahun 2024 - Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar, dengan target 19,48% tahun 2020 menjadi 23,36% tahun 2024 - Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat, dengan target 1,00% tahun 2020 menjadi 2,00% tahun 2024
2	Terwujudnya Layanan Prima, Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara	Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara	- Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, dengan target 75,5 tahun 2020 menjadi 85,0 tahun 2024 - Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan di PERPUSNAS, dengan target 0,5% tahun 2020 menjadi 2,5% tahun 2024

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Program	Indikator
			- Persentase Peningkatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Menjadi Koleksi Nasional, dengan target 5% setiap tahunnya - Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno, dengan target 18,43% tahun 2020 menjadi 22,57% tahun 2024
3	Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Perpustakaan Nasional Yang Baik dan Handal	Program Dukungan Manajemen	- Indeks Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional RI dengan target 75 tahun 2020 menjadi 95 tahun 2024 - Indeks SPBE, dengan target 3,06 tahun 2020 menjadi 3,62 Tahun 2024 - Opini BPK atas Laporan Keuangan Perpustakaan -Nasional dengan target opini WTP tahun 2020 dan juga WTP tahun 2024 - Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan target 3,7 tahun 2020 menjadi 4,1 tahun 2024
2	**Arsip Nasional Indonesia**		
1	Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan sebesar 73 pada 2024
2	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	Indeks Ketersediaan Arsip sebesar 80 pada 2024
3	Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan sebesar 70 pada 2024
4	Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	Program Dukungan Manajemen	Indeks Reformasi Birokrasi BB pada 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan telaahan sebagai berikut :

1. Renstra Perpustakaan Nasional RI 2020 – 2024
   a. Pada sasaran Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi, DPK Provinsi Banten bersepakat untuk terus meningkatkan jumlah Perpustakaan Berstandar dari seluruh jenis perpustakaan yang ada di Provinsi Banten. Dimana pada tahun 2021 telah terdapat 112 Perpustakaan berstandar dari sekitar 200 perpustkaan yang sedang mengajukan proses standarisasi. Setiap tahun DPK Provinsi Banten melakukan pendampingan bagi perpustakaan yang mengajukan standarisasi perpustakaan sekaligus terus melakukan upaya bintek bagi pengelola perpustakaan dan melakukan koordinasi intensif dengan stakeholder terkait khususnya Dinas Penddikan untuk memperkuat peran perpustakaan dalam aspek manajeman sekolah. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial juga dilakukan pada tataran

layanan perpustakaan di DPK Provinsi Banten maupun penguatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota. Hambatan yang ditemui terdapat pada masih rendahnya komitmen top manajemen perpustakaan untuk mengikuti akreditasi perpustakaan serta memenuhi unsur instrument penilaian akreditasi. Hal ini berdampak pada masih sedikitnya perpustakaan di Provinsi Banten yang memiliki sertifikasi perpustakaan.

b. Pada sasaran Terwujudnya Layanan Prima, Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara, DPK Provinsi Banten juga telah melaksanakan upaya pelayanan prima perpustakaan melalui berbagai inovasi pelayanan seperti MUPK, Mobil Pintar, i-Banten, Layanan Silang Layan dan sebagainya untuk meningkatkan jumlah kunjungan perpustakaan dan mengoptimalisasi pendayagunaan perpustakaan. Telah dilakukan juga pengembangan Layanan Banten Corner sebagai pusat koleksi keBantenan pada DPK Provinsi Banten. Hambatan yang dihadapi terdapat pada kurang maksimalnya upaya peningkatan koleksi Kebantenan baik melalui pengadaan maupun akuisisi koleksi naskah kuno, karena terbatasya koleksi yang tersedia

c. Pada sasaran Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Perpustakaan Nasional Yang Baik dan Handal, tidak dilakukan telaahan karena merupakan target internal Perpusnas RI

2. Renstra Arsip Nasional RI 2020 – 2024

a. Pada sasaran meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan, DPK Provinsi Banten telah mengimplementasikan dalam bentuk audit pengawasan kearsipan internal (seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Banten) dan audit pengawasan kearsipan eksternal (8 Kab/Kota yang ada di wilayah Provinsi Banten. Dalam hasil audit diterbitkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan terhadap pelaksanaan ketentuan kearsipan. Hambatan yang diperoleh adalah belum meratanya kesadaran pimpinan lembaga kearsipan/pencipta arsip terhadap upaya pemenuhan pengelolaan arsip sesuai standart, yang berdampak pada dukungan penyelenggaraan kearsipan yang kurang maksimal;

b. Pada sasaran Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional, DPK Provinsi Banten berupaya meningkatkan khasanah arsip statis dengan melakukan akuisisi pada OPD dilingkup Pemprov Banten dan instansi pencipta arsip bernilai sejarah seperti Mathlaul Anwar, Al

Khaeriyah dan sebagainya. DPK Provinsi Banten juga mendorong pengelolaan arsip dinamis di setiap OPD dan bersiap melaksanakan aplikasi e – arsip (SRIKANDI), serta mengoptimalkan penelusuran arsip melalui konten digital pada JIKN/JIKP Provinsi Banten. Hambatan yang ditemui adalah kurangnya koordinadi dengan pemangku kepentingan dapat menghambat pelaksanaan kegiatan, khususnya pada penerapan e-arsip, sehingga ke depan perlu ditingkatkan lagi.

c. Pada sasaran Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima, DPK Provinsi Banten telah melakukan jemput bola melalui Gerakan Masyarakat Sadar Arsip, berupa melakukan roadshow sosialasi sadar arsip kepada masyarakat di kecamatan pada 8 Kabupaten/Kota se Provinsi Banten. Selain itu juga dilakukan layanan Mobil Arsip Kelilng, pameran kearsipan serta pemutaran film dokumenter kearsipan. Kedepan akan lebih ditingkatkan lagi layanan kearsipan dengan basic arsip yang dimanfaatkab/diakses. Hambatan yang dijumpai adalah belum terkompilasinya daftar yang arsip yang ada dalam satu bentuk big data/database yang mempermudah pencarian arsip

d. Pada sasaran Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI, tidak dilakukan telaahan karena merupakan target internal Arsip Nasional RI

3.4. Telaah an Renstra Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten / Kota Se- Provinsi Banten

Tabel 3.4
Visi Misi Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Banten

NO	INSTANSI	VISI	No	MISI
1.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon	Terwujudnya Kota Cilegon yang Unggul dan Sejahtra Berbasis Industri Perdagangan dan Jasa	1.	Memantapkan Kemandirian Perekonomian Daerah
			2.	Memantapkan Lingkungan Kota yang Asri dan Lestari
			3.	Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kesejahtraan Sosail
			4.	Memantapkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota
			5.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan
2.	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Serang	Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas Menuju Kabupaten Serang yang Agamis, Adil dan Sejahtra	1.	Memantapkan Fungsi dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral dan Spiritual dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat dan Bernegara
			2.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat,Cerdas, Berakhlaskul Karimah dan Berbudaya
			3.	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Dasar di Semua Wilayah
			4.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Memperkuat Struktur Perekonomian Daerah
			5.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
			6.	Mengembangkan Kawasan Strategis, Cepat Tumbuh, Pesisir dan Pulau-Pulau
			7.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta Didukung Kondisi Sosial, Politik, Keamanan yang Kondusif dan Strategis
3.	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang	Pusat informasi pustaka dan arsip menuju masyarakat pembelajar.	1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya perpustakaan dan kearsipan
			2.	Mengembangkan layanan pustaka dan arsip dengan prinsip kemitraan dengan swasta

NO	INSTANSI	VISI	No	MISI
			3.	Mengembangkan layanan pustaka dan informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
4.	Kantor Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan	Terwujutnya Kota Tangerang Selatan yang Mandiri, Damai dan Asri	1.	Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat
			2.	Meningkatkan keharmonisan fungsi ruang kota yang berwawasan lingkungan;
			3.	Menata sistem sarana dan prasarana dasar perkotaan
5.	Kantor Perpustakaan Daerah Kota Tangerang	Terwujudnya perpustakaan sebagai pusat layanan informasi menuju masyarakat Kota Tangerang yang cerdas dan berakhlaqul karimah.	1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan perpustakaan
			2.	Meningkatkan kualitas sumber daya pengelolaa kearsipan
			3.	Meningkatkan layanan serta pemasyarakatan perpustakaan
			4.	Meningkatkan pengembangan dan pembinaan perpustakaan
			5.	Meningkatkan informasi dan kerasama perpustakaan
			6.	Meningkatkan budaya baca masyarakat
			7.	Meningkatkan penyelamatan dan pelestarian hasil budaya bangsa berupa Karya cetak dan karya rekam
6.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019	Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	1.	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif;
			2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik;
			3.	Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan;
			4.	Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas;
			5.	Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan;
			6.	Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah.

NO	INSTANSI	VISI	No	MISI
7.	Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Tangerang	Terwujudnya Perpustakaan Terunggul di Provinsi Banten dan Tertib Administrasi Tata Kearsipan Daerah 2018	1.	Menjadikan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang sebagai Pusat Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
			2.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Pengelolaan dan Pembinaan Perpustakaan dan kearsipan kepada masyarakat dan OPD
			3.	Meningkatnya Promosi, Kerjasama, Pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan dalam rangka pengembangan sistem informasi perpustakaan dan kearsipan
			4.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Perpustakaan dan kearsipan.
8.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Serang	Mewujudkan Kota Serang menjadi akses pusat informasi terdepan melalui bahan pustaka dan arsip.	1.	Mewujudkan masyarakat Kota Serang yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,
			2.	Memasyarakatkan budaya baca dan tertib kearsipan,
			3.	Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan perpustakaan dan kearsipan
			4.	Meningkatkan kualitas aparatur pengelolaan perpustakaan dan kearsipan
			5.	Meningkatkan pelayanan prima pengelolaan perpustakaan dan kearsipan.

`

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dari segi tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten pada dasarnya menyelenggarakan tugas dan urusan di bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota. Analisis lingkungan strategis yang menjelaskan tentang berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten serta berbagai peluang dan tantangan yang berasal dari lingkungan eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Beikut Analisa lingkungan strategis dapat digambarkan pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Kajian Letak Geografis DPK	Letak spasial Gedung DPK		Posisi Gedung DPK berdekatan dengan sarana transportasi yang memudahkan akses pengunjung Lokasi Perpustakaan yang berdekatan dengan kampus
Kajian Lingkungan	Keamanan, Kebersihan, Ketertiban	Posisi DPK berada di pusat keramaian yang mengundang penanganan keamanan , kebersihan , ketertiban diperlukan pengawasan	Adanya dukungan dan Partisipasi masyarakat terhadap keberadaan DPK

3.6. Penentuan Isu Strategis

Metode Penentuan Isu strategis dilakukan melalui analisis SWOT dengan merujuk pada kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pada semua aspek yakni; pelayanan DPK, sasaran renstra K/L, Impilkasi RTRW dan KLHS.

Selanjutnya yang menjadi rumusan isu strategis adalah sebagai berikut;

1. Tata kelola pemerintahan yang baik

`

2. Peningkatan Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat
3. Peningkatan ketersediaan, keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban

BAB IV

`

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah DPK Provinsi Banten

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Pemerintah Daerah Provinsi Banten, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Tujuan RPJPD tahun 2005 – 2025 Provinsi Banten dalam rangka mendukung pernyataan misi Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas

   Tujuan : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Harapan Lama Sekolah (HLS)

2. Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa

   Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi / Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan

Tujuan yang akan dicapai oleh DPK Provinsi Banten Tahun 2023-2026 berdasarkan rumusan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas

   Tujuan : Peningkatan budaya Baca, inovasi dan kreatifitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter

   Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa

   Tujuan :

   a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perangkat daerah
   b. Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

4.2. Sasaran Jangka Menengah DPK Provinsi Banten

`

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan . Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi. Sasaran yang akan dicapai oleh DPK Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 berdasarkan rumusan Misi RPJPD Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas
    - Meningkatkan pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat. Yang diukur dari:
        a. Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat
        b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
2. Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa
    - Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada perangkat daerah
    - Meningkatnya kualitas kearsipan daerah. Yang diukur dari:
        a. Capaian SAKIP Perangkat Daerah
        b. Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPK Provinsi Banten

No	Tujuan	Sasaran	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN			
				2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Budaya Baca, Inovasi dan Kreatifitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	67,3	69,3	72,3	75,3
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13	14	15	16
2	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	72	75	78	80
3	Terwujudnya Pemanfaatan Arsip	Meningkatnya kualitas	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	80	80	80	90

`

No	Tujuan	Sasaran	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN			
				2023	2024	2025	2026
	untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	kearsipan daerah					

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi DPK Provinsi Banten

Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (grand design), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi,tujuan dan sasaran suatu organisasi.

`

Strategi RPJPD tahun 2005 – 2025 Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas
   - Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau
2. Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa
   - Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur

Sedangkan strategi jangka menengah DPK Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas
   - Meningkatkan Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat Ditandai dengan Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca
2. Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa
   - Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah
   - Meningkatnya Ketersediaan Arsip yang Otentik, Utuh, Terpercaya dan Peningkatan Pemanfaatan Kearsipan

5.2. Arah Kebijakan DPK Provinsi Banten

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu yang telah ditetapkan, memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Arah kebijakan RPJPD tahun 2005 – 2025 Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas
   - Pembinaan dan fasilitasi minat dan budaya baca masyarakat
2. Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa

- Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur;
- Peningkatan kualitas kearsipan daerah

Arah kebijakan jangka menengah DPK Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas
   - Peningkatan Budaya Literasi Melalui Pemasyarakatan Gemar Membaca, Penguatan Konten Literasi, Transformasi Perpustakaan , Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Melalui Akreditasi dan standarisasi Penguatan Sistem Informasi Perpustakaan yang Terpadu serta Pelestarian , Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Perpustakaan.
2. Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa
   - Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah.
   - Meningkatkan Akusisi, Pengolahan, Pengelolaan, Penyusutan, Preservasi Arsip Daearah dan Optimalisasi Layanan Kearsipan dan Pelaksanaan E-arsip

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISi BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA			
Misi 1 Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategis**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya Budaya Baca, Inovasi dan Kreatifitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Meningkatkan Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat Ditandai dengan Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca	Peningkatan Budaya Literasi Melalui Pemasyarakatan Gemar Membaca, Penguatan Konten Literasi, Transformasi Perpustakaan , Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Melalui Akreditasi dan standarisasi Penguatan Sistem Informasi Perpustakaan yang Terpadu serta Pelestarian , Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Perpustakaan
Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa			
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

	Pemerintahan Pada Perangkat Daerah		
Terwujudnya Pemanfaatan Arsip untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kualitas kearsipan daerah	Meningkatnya Ketersediaan Arsip yang Otentik, Utuh, Terpercaya dan Peningkatan Pemanfaatan Kearsipan	Meningkatkan Akusisi, Pengolahan, Pengelolaan, Penyusutan, Preservasi Arsip Daearah dan Optimalisasi Layanan Kearsipan dan Pelaksanaan E-arsip

5.3. Arah Kebijakan Tahunan DPK Provisi Banten

Beberapa arah kebijakan berikut ini akan menjadi acuan dan pertimbangan dalam upaya melaksanakan misi, tujuan dan sasaran di lingkup tugas-tugas DPK Provinsi Provinsi Banten :

a. Kebijakan bidang perpustakaan:

- Pembinaan kepada semua jenis perpustakaan dalam upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan;
- Pengembangan perpustakaan melalui penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan; peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan; perpustakaan inklusi sosial; dan kerjasama dan kemitraan, dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi terhadap masyarakat yang berkontribusi terhadap literasi dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca;
- Melakukan optimalisasi fasilitas perpustakaan yang sesuai dengan standar perpustakaan;
- Meningkatkan dan mengembangkan koleksi perpustakaan serta memfasilitasi pengembangan koleksi semua jenis perpustakaan, terutama pelestarian koleksi lokal dan muatan lokal Banten
- Meningkatkan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan serta pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat

b. Kebijakan bidang kearsipan:

- Membangun sistem administrasi kearsipan dengan pemanfaatan tekonologi informasi dan penyediaan pedoman kearsipan dalam bentuk regulasi, meliputi :

`

Menyusun peraturan/pedoman sistem kearsipan; Mengembangkan kearah sistem administrasi kearsipan digital; Optimalisasi pelatihan – pelatihan SDM kearsipan baik pejabat fungsional arsiparis maupun pengelola arsip;

- Optimalisasi akuisisi, perbaikan dan alih media arsip yang bernilai guna meliputi : Akuisisi arsip statis baik di instansi Pemerintah, BUMN/D, Orsospol/ Ormas, Swasta maupun perorangan; Meningkatkan preservasi dan alih media arsip statis; Mengelola dan merawat arsip baik statis maupun inaktif
- Optimalisasi pelayanan dan sosialisasi kearsipan yang dilakukan dengan berbagai metode sosialisasi, seperti : Pameran arsip; Promosi jasa kearsipan, Penerbitan naskah sumber dan buletin kearsipan; Pelayanan informasi arsip;
- Menyelenggarakan tugas pelayanan dengan melakukan optimalisasi SDM dan pelayanan publik; pembentukan posko pelayanan publik untuk bahan pustaka maupun arsip; melakukan debirokratisasi dan deregulasi dalam meningkatkan pelayanan public;

Dalam upaya untuk mengakomodasi dan merespon perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh sesuai dengan paradigm baru yang berkembang di tataran nasional dan terefleksi pada penyadaran pemikiran masyarakat, berikut ini beberapa perumusan kebijakan terkait dengan reposisi peran perpustakaan dan arsip di waktu-waktu mendatang :

a. Perpustakaan dan arsip merupakan wadah pendidikan demokratis masyarakat dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa
b. Perpustakaan dan arsip dapat berperan sebagai pusat pembelajaran masyarakat secara independen, sehingga perlu mendapatkan kepedulian dari semua pihak, terutama fasilitasdari pihak pemerintah
c. DPK Provinsi Banten diarahkan untuk mampu mengakomodasi berbagai perubahan kebutuhan dan keinginan masyarakat terkait dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi
d. DPK Provinsi Banten diarahkan untuk mampu mengembangkan kerjasama yang saling mendukung serta menguntungkan dengan seluruh pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat

5.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten

5.4.1. Tantangan

a. Perkembangan Jumlah Penduduk

`

Jumlah penduduk Provinsi Banten terus bertambah. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan, jumlah penduduk tahun 2021 adalah sebesar 11.788.728 jiwa (Data Ditjen Dukcapil Kemendagri RI semester I Tahun 2021). Angka tersebut akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Keseluruhan jumlah masyarakat Provinsi Banten yang begitu besar merupakan pemustaka potensial (potential user) yang menjadi sasaran pelayanan perpustakaan. Agar layanan perpustakaan dapat menjangkau seluruh masyarakat Provinsi Banten dan membuat semuanya menjadi pemustaka riil (actual user) diperlukan usaha yang terencana, sistematis dan berkesinambungan

b. Peningkatan IPM Provinsi Banten

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan potret peningkatan kualitas hidup. Peningkatan IPM menunjukkan keberhasilan dalam usaha pembangunan manusia. IPM Provinsi Banten selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan IPM tahun 2021 adalah 72,72 (rata –rata nasional 72, 29). Usaha untuk meningkatkan IPM berkaitan erat dengan pola pikir masyarakat. Jika masyarakat memiliki kegemaran membaca, mereka akan mendapat banyak informasi yang benar yang dapat mempengaruhi pola pikir dan kemampuannya sehingga program - program pemerintah apa pun yang dilaksanakan baik dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi akan berhasil. Keberhasilan tersebut akan tercermin dalam peningkatan IPM Provinsi Banten

c. Pengembangan sektor pendidikan dan SDM Provinsi Banten

Pembangunan pendidikan di Provinsi Banten diarahkan pada Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas RENSTRA DPK Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, dan kemudian dapat terserap dalam lapangan kerja. Taraf pendidikan di Provinsi Banten terus mengalami peningkatan diukur dari menurunnya angka buta huruf dan meningkatnya angka partisipasi sekolah, namun demikian kualitas tenaga kerja di Provinsi Banten relatif masih rendah hal itu ditunjukkan dengan struktur tenaga kerja yang masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar.

d. Bencana Alam

Banyaknya bencana alam di negara kita menimbulkan tantangan baru dan sekaligus menjadi hambatan yang sangat krusial dalam penyelamatan dokumen. Dalam hal ini, bencana bukan hanya berasal dari faktor alam tetapi juga faktor lain seperti pencurian, kebakaran, kerusuhan / demonstrasi massa, serta faktor lain yang disebabkan oleh manusia. Isu-isu inilah yang ke depan harus segera diprediksi dari awal. Kita harus menghadapi dan mencari solusi di mana lebih mengedepankan

kebijakan pada kebijakan yang berpihak pada penyelamatan budaya dan aset bangsa sebagai suatu ilmu dan pengetahuan di masa mendatang.

5.4.2. Peluang

Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Banten yang terus meningkat, perlu diantisipasi serta diperkirakan tingkat kebutuhan akan sarana/prasarana serta fasilitas pendukung kerja maupun jumlah staf pengelola, sesuai dengan rasio ideal yang ada. Agar proses pelayanan publik dan kenyamanan masyarakat dapat tetap berjalan dengan baik sesuai dengan standar ideal/normal yang berlaku.

Proyeksi peningkatan angka IPM di Provinsi Banten , membutuhkan dukungan penyediaan sarana, prasarana serta fasilitas pendukung terkait yang memadai, sesuai dengan kualitas hidup manusia/penduduk Indonesia yang terus membaik untuk menuju kepada kondisi ideal dengan IPM di atas 90 selaras dengan IPM negara-negara maju.

Jumlah orang yang melek huruf di Provinsi Banten dan angka partisipasi sekolah dari data-data yang ada menunjukkan selalu terjadi peningkatan. Kondisi ini memerlukan suatu persiapan khusus terkait penyediaan sarana prasarana serta fasilitas pendukung yang dibutuhkan, terutama dari sisi kualitas SDM. Peningkatan jumlah ketersediaan informasi baik berupa peningkatan jumlah penerbitan bahan perpustakaan tercetak seperti buku, majalah, surat kabar, brosur dan lain-lain, bahan terekam seperti CD/DVD maupun bahan yang tersedia secara online dalam jaringan internet dapat dikumpulkan, diolah dan disebarluaskan kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan kepustakawanan.

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi di tengah arus reformasi dan globalisasi, memberi peluang pada lembaga perpustakaan dan kearsipan untuk melakukan akuisis arsip baik arsip OPD, BUMD, sekolah, ormas/orpol ataupun swasta. Serta membuka/membina perpustakaan yang tersebar di seluruh pelosok Provinsi Banten.

Masyarakat semakin sadar bahwa informasi menjadi komoditi penting dan diminati sekarang ini. Apalagi dengan adanya teknologi informasi dan pemanfaatannya dalam administrasi pemerintahan. Tentu saja, hal ini akan meningkatkan jumlah arsip baik dinamis maupun statis di setiap OPD.

Dengan banyaknya perpustakaan yang dibuka, berarti membutuhkan lebih banyak koleksi pustaka baik terbitan dalam maupun luar negeri untuk menambah koleksi. Hal ini memberi peluang pada penerbit untuk menghasilkan bahan pustaka

`

yang lebih banyak dan berkualitas. Di antara peluang - peluang yang ada, sebaliknya juga muncul sejumlah ancaman, seperti :

- Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pengelolaan arsip maupun perpustakaan. Akibatnya banyak perpustakaan yang belum berjalan dengan baik karena kekurangan bahan pustaka serta SDM pengelola. Di bidang kearsipan, banyak arsip yang belum terkelola dengan baik di unit-unit kerja
- Muncul banyaknya peraturan perundangan yang berdampak pada pengelolaan kearsipan, juga banyaknya jasa commercial records center yang dikelola pihak swasta, sehingga mengurangi peran penting lembaga kearsipan.
- Kemiskinan dan pengangguran menjadi penghalang bagi masyarakat dalam mengakses informasi publik. Tidak meratanya tingkat pendidikan di masyarakat menjadi problem khusus dalam mendapatkan layanan informasi.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk tahun 2023 – 2026 terdiri dari beberapa prioritas yang telah ditetapkan dalam RENSTRA DPK Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026.

Program dan Kegiatan Renstra DPK Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten 2023 – 2026 , yang disusun secara teknokratik berdasar kepada RPJPD Provinsi Banten tahun 2005 - 2025 dan dituangkan dalam bentuk prioritas kegiatan pada masing-masing perangkat daerah. Untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, kegiatan prioritas daerah yang tertuang dalam Renstra adalah sebagai berikut:

`

6.1. Kegiatan Prioritas DPK Provinsi Banten Berdasarkan RPD Tahun 2023 – 2026

Tabel 6.1
Program Dan kegiatan Indikator Kinerja Tahun 2023 – 2026

NO	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (ouput)
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

`

NO	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (ouput)
1	2	3	4	5
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Penambahan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
		Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan di Perpustakaan daerah	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
3	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Arsip Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
		Persentase Peningkatan Pengguna layanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Ketercapaian Jumlah Pengguna Kegiatan Pengelolaan Simpul aringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi

`

NO	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (ouput)
1	2	3	4	5
4	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Peningkatan Arsip statis Hasil Alih Media	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Arsip Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis daArsip Hasil AliMedia yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi
			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	Ketercapaian Jumlah Arsip Kegiatan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawa	Lokasi
						2023		2024		2025		2026					
						Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Perangkat Daerah																	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Perangkat Daerah																

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawa	Lokasi
						2023		2024		2025		2026					
						Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	**70.65 (BB)**	**70-80**	**20.232.774.000**	**70-80**	**21.244.412.000**	**70-80**	**22.306.633.000**	**70-80**	**23.421.964.000**	**100**	**23.421.964.000**	**DPK Provinsi Banten**	**Provinsi Banten**
		2 23 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**100**	**100**	**20.232.774.000**	**100**	**21.244.412.000**	**100**	**22.306.633.000**	**100**	**23.421.964.000**	**100**	**23.421.964.000**	**DPK Provinsi Banten**	**Provinsi Banten**
		2 23 01 1.01	**kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100.000.000**	**100**	**108.000.000**	**100**	**108.000.000**	**100**	**108.000.000**	**100**	**108.000.000**		**Provinsi Banten**
		2 23 01 1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100	100	**16.650.348.000**	100	**17.465.155.000**	100	**18.320.704.000**	100	**19.219.029.000**	100	**19.219.029.000**	**DPK Provinsi Banten**	**Provinsi Banten**

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawa	Lokasi
						2023		2024		2025		2026					
						Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2 23 01 1.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**5.000.000**	**100**	**5.000.000**	**100**	**5.000.000**	**100**	**5.000.000**	**100**	**5.000.000**	**DPK Provinsi Banten**	**Provinsi Banten**
		2 23 01 1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah"**	**100**	**100**	**300.000.000**	**100**	**313.831.100**	**100**	**345.000.000**	**100**	**395.000.000**	**100**	**395.000.000**	**DPK Provinsi Banten**	**Provinsi Banten**
		2 23 01 1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	100	**2.877.426.000**	100	**2.977.425.900**	100	**3.027.425.900**	100	**3.114.935.000**	100	**3.114.935.000**	**DPK Provinsi Banten**	**Provinsi Banten**
		2 23 01 1.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**100**	**100**	**100.000.000**	**100**	**125.000.000**	**100**	**150.000.000**	**100**	**220.000.000**	**100**	**220.000.000**	**DPK Provinsi Banten**	**Provinsi Banten**

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawa	Lokasi
						2023		2024		2025		2026					
						Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Pemerintah Daerah													
		2 23 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**200.000.000**	**100**	**250.000.000**	**100**	**350.503.100**	**100**	**360.000.000**	**100**	**360.000.000**	**DPK Provinsi Banten**	**Provinsi Banten**
Terwujudnya Budaya Baca, Inovasi dan Kreatifitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakte																	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawa	Lokasi
						2023		2024		2025		2026					
						Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat																
				Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	**61,78**	**67,3 Nilai**	**1.000.000.000**	**69,3 Nilai**	**1.751.355.000**	**72,3 Nilai**	**2.300.000.000**	**75,3 Nilai**	**4.000.000.000**	**75,3 Nilai**		**DPK Provinsi Banten**	**Provinsi Banten**
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	**9,04**	**13 Nilai**	**2.945.225.777**	**14 Nilai**	**3.300.000.000**	**15 Nilai**	**4.600.000.000**	**16 Nilai**	**4.000.000.000**	**16 Nilai**		**DPK Provinsi Banten**	**Provinsi Banten**
		2 23 02	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Persentase Penambahan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah**	**61.289**	**1**	**2.945.225.777**	**2**	**3.300.000.000**	**3**	**4.600.000.000**	**4**	**4.000.000.000**	**4**		**DPK Provinsi Banten**	**Provinsi Banten**
				Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan di Perpustakaan daerah	**17.906**	**20**	**1.000.000.000**	**20**	**1.751.355.000**	**21**	**2.300.000.000**	**22**	**4.000.000.000**	**22**		**DPK Provinsi Banten**	**Provinsi Banten**

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawa	Lokasi
						2023		2024		2025		2026					
						Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2 23 02 1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**		**100%**	**2.945.225.777**	**100%**	**3.300.000.000**	**100%**	**4.600.000.000**	**100%**	**6.800.000.000**	**100 %**	**6.800.000.000**	**DPK Provinsi Banten**	**Provinsi Banten**
		2 23 02 1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**100%**	**100%**	**1.000.000.000**	**100%**	**1.751.355.000**	**100%**	**2.300.000.000**	**100%**	**4.000.000.000**	**100 %**	**4.000.000.000**	**DPK Provinsi Banten**	**Provinsi Banten**
Terwujudnya Pemanfaatan Arsip untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik																	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawa	Lokasi
						2023		2024		2025		2026					
						Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya Kualitas Kearsipan Daerah																
				Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	BB	BB	**3.389.380.223**	BB	**5.900.000.000**	BB	**8.032.416.000**	A	**10.506.225.000**	**A**		**DPK Provinsi Banten**	**Provinsi Banten**
		2 24 02	**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi**	26370	20	**1.700.000.000**	22	**2.800.000.000**	24	**3.832.416.000**	26	**5.000.000.000**	**26**		**DPK Provinsi Banten**	**Provinsi Banten**
				Persentase Peningkatan Pengguna layanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	61.316	20	**400.000.000**	20	**900.000.000**	21	**1.000.000.000**	22	**1.206.225.000**	**22**		**DPK Provinsi Banten**	**Provinsi Banten**
		2 24 02 1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	100%	100%	**1.000.000.000**	100%	**1.600.000.000**	100%	**2.232.416.000**	100%	**3.000.000.000**	100 %	**3.000.000.000**	**DPK Provinsi Banten**	**Provinsi Banten**

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawa	Lokasi
						2023		2024		2025		2026					
						Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2 24 02 1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**Ketercapaian Jumlah Arsip Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**		3.002 Arsip	**700.000.000**	3.502 Arsip	**1.200.000.000**	4.002 Arsip	**1.600.000.000**	4.502 Arsip	**2.000.000.000**	4.502 Arsip	**2.000.000.000**	**DPK Provinsi Banten**	**Provinsi Banten**
		2 24 02 1.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**Ketercapaian Jumlah Pengguna Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**		76.517 Pengguna	**400.000.000**	91.718 Pengguna	**900.000.000**	100.873 Pengguna	**1.000.000.000**	110.911 Pengguna	**1.206.225.000**	110.911 Pengguna	**1.206.225.000**	**DPK Provinsi Banten**	**Provinsi Banten**
		2 24 03	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Persentase Peningkatan Arsip statis Hasil Alih Media**	26.370	20	**1.289.380.223**	22	**2.200.000.000**	24	**3.200.000.000**	26	**4.300.000.000**	**26**		**DPK Provinsi Banten**	**Provinsi Banten**
		2 24 03 1.04	**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**	**Ketercapaian Jumlah Arsip Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**		5.001 Arsip	**700.000.000**	5.001 Ar	**1.100.000.000**	5.002 Arsip	**1.600.000.000**	5.002 Arsip	**2.100.000.000**	5.002 Arsip	**2.100.000.000**	**DPK Provinsi Banten**	**Provinsi Banten**

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawa	Lokasi
						2023		2024		2025		2026					
						Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2 24 03 1.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memiliki Retensi dibawah 10 Tahun**	**Ketercapaian Jumlah Arsip Kegiatan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**		600 Arsip	**589.380.223**	700 Arsip	**1.100.000.000**	800 Arsip	**1.600.000.000**	900 Arsip	**2.200.000.000**	900 Arsip	**2.200.000.000**	**DPK Provinsi Banten**	**Provinsi Banten**

`

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama ukuran kurun waktu tertentu, dapat disajikan dalam tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Bidang Urusan Esellon II

No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (BASE LINE) 2021	TARGET				KONDISI KINERJA AKHIR
				2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,65	72	75	78	80	80
2	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	65.70	67,3	69,3	72,3	75,3	75,3
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	9,04	13	14	15	16	16
4	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	80	80	80	80	90	90

indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Selaku pelaksana Program Pembinaan Perpustakaan, Pengelolaan arsip, dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 di uraikan pada tabel berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program pada DPK Provinsi Banten

No	Indikator Program	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2023	2024	2025	2026	
			Target	Target	Target	Target	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**						
	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100	100	100	100
2	**Program Pembinaan Perpustakaan**						
	Persentase Penambahan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	61.289	1	2	3	4	4
	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan di Perpustakaan daerah	17.906	20	20	21	22	22
3	**Program Pengelolaan Arsip**						
	Persentase arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	26.370	20	22	24	26	26
	Persentase Peningkatan Pengguna layanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	61.316	20	20	21	22	22
4	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**						
	Persentase Peningkatan Arsip statis Hasil Alih Media	26.370	20	22	24	26	26

`

BAB VIII
PENUTUP

8.1. Kaidah Pelaksanaan RENSTRA

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten 2023 - 2026 ini memuat kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Baten 2023- 2026 sebagai dasar penyusunan RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.
2. Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan perubahan Renstra yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Banten yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) serta aturan yang berlaku terkait penyusunan Renstra Perangkat Daerah

8.2 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten 2023 - 2026 disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2023 – 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJPD Provinsi 2005-2025, RPD 2023 – 2026, memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RKP tahun 2023 serta tahun 2024

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten 2023 - 2026 ditetapkan dengan Peraturan Gubenur Banten dan disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perpustakaan dan kearsipan Provinsi Banten, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan

respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Apabila terdapat perubahan mendasar yang berhubungan dengan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten maka dokumen Rencana Strategis ini akan dilakukan penyesuaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 ini menjadi acuan kerja, pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi sekretariat dan bidang–bidang di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BANTEN

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Tk. I
NIP. 19700320 200112 1 001